

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pengertian

##### 1. *Community Based Tourism (CBT)*

Dalam wacana etimologi *Community Based* diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari tiga suku kata *community*, *based* dan *Tourism*. ‘*Community*’ diartikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah komunitas, masyarakat, komunitas, persamaan, himpunan<sup>36</sup>; sedangkan ‘*Based*’ adalah berbasis, pendekatan, pengelolaan<sup>37</sup>; kemudian ‘*Tourism*’ berarti kepariwisataan, pariwisata<sup>38</sup>. Dapat disimpulkan secara umum *community based tourism* adalah pariwisata berbasis masyarakat. Sebagai pemahaman atas *community based tourism* itu seperti Sunaryo menyatakan *Community Based Tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat merupakan terlibatnya masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari adanya obyek wisata dengan cara pendampingan masyarakat lokal untuk mengembangkan obyek wisata<sup>39</sup>.

Garrod dalam karyanya yang berjudul ‘*Local Partisipation in the Planning and Management of Eco Tourism A Resived Model Approach*’ menyatakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada

---

<sup>36</sup> Kamiso, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Karya Agung, h. 64.

<sup>37</sup> Kamiso, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Karya Agung, h. 32.

<sup>38</sup> Kamiso, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Karya Agung, h. 294.

<sup>39</sup> Sunaryo, B, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, h. 139.

masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung diperdesaan<sup>40</sup>.

Seperti keduanya, Endah memahami *Community Based Tourism* (CBT) yaitu bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan dari obyek wisata tersebut, dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan pada kelompok yang kurang beruntung di perdesaan<sup>41</sup>.

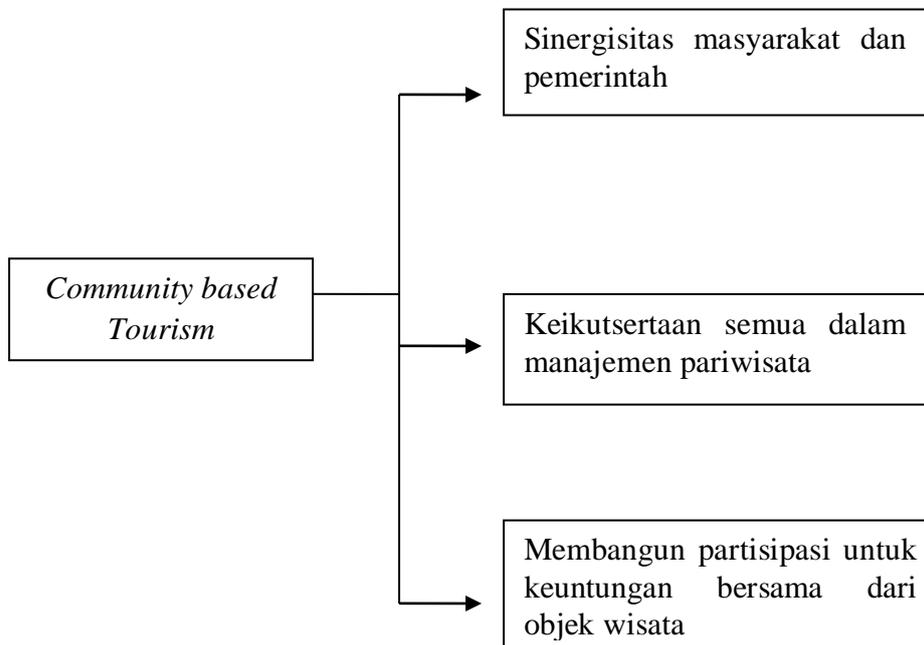
Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Community Based Tourism* (CBT) seperti dalam gambar berikut:

---

<sup>40</sup> Garrod, Brain, 2001, *Local Partisipation in the Planning and Management of EcoTourism A Resived Model Approach*, University of the West of England. Bristol, h. 4.

<sup>41</sup> Endah, Sri Nurhidayati, 2007, *Community Based Tourism (CBT) Sebagai PendekatanPembangunan Pariwisata Berkelanjutan*, Jurnal Pariwisata UNAIR, 20 No 3.

GAMBAR 2.1

Definisi *Community Based Tourism* (CBT)

## 2. Sustainable Tourism

Secara etimologi *Sustainable Tourism* diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata *Sustainable* dan *Tourism*. 'Sustainable' diartikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah berkelanjutan<sup>42</sup>; sedangkan 'Tourism' berarti kepariwisataan, pariwisata<sup>43</sup>. Dapat disimpulkan secara umum *Sustainable Tourism* adalah pariwisata berkelanjutan.

Definisi yang lebih teknis dapat dipahami pertama kali dikemukakan oleh *the World Commission for Environment and Development (WCED)*, yaitu komisi

<sup>42</sup> Kamiso, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Karya Agung, h. 64.

<sup>43</sup> Kamiso, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Karya Agung, h. 294.

dunia untuk lingkungan dan pembangunan yang didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan pariwisata berkelanjutan dapat diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada masa mendatang<sup>44</sup>.

Haryanto dalam penghargaan Piagam Pariwisata Berkelanjutan 1995 memahami bahwa pariwisata harus didasari kriteria yang berkelanjutan yang intinya adalah bahwa pembangunan ekologi jangka panjang harus didukung dan pariwisata harus layak secara ekonomi serta adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat lokal, artinya pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang terpadu dan terorganisir untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan<sup>45</sup>.

Mahdayani menyatakan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan diperlukan rasa tanggung jawab dan tidak mengakibatkan kerusakan alam dan budaya serta menghormati adat istiadat destinasi wisata. Wisata berkelanjutan juga dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi kawasan pariwisata dan serta

---

<sup>44</sup> Chamdani, Usman, 2018, *Dimensi-dimensi Pariwisata Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish, h. 67.

<sup>45</sup> Haryanto, Joko Tri, 2014, Model Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY, *Kawistara*, Vol.3.

meningkatkan penyediaan jasa disekitar kawasan wisata<sup>46</sup>. Selain berfokus pada penjagaan terhadap keaslian suatu daerah (baik alam maupun adat istiadat), pariwisata berkelanjutan juga bisa sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah<sup>47</sup>.

Chamdani pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan upaya terpadu dan terorganisir guna mengembangkan kualitas hidup melalui pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dapat terlaksana dengan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melibatkan partisipasi aktif dan seimbang dari pemerintah, swasta, serta masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait pada isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas<sup>48</sup>.

PERMENPAR No. 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan menyatakan bahwa Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

---

<sup>46</sup> Satria, D, 2009, Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang, *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol.3.No.1.

<sup>47</sup> Mahdayani, W, 2009, *Ekowisata Panduan Dasar Pelaksanaan*, Nias Selatan: UNESCO dan Dinbudpar Nias Selatan, h. 14.

<sup>48</sup> Chamdani, Usman, 2018, *Dimensi-dimensi Pariwisata Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish, h. 28.

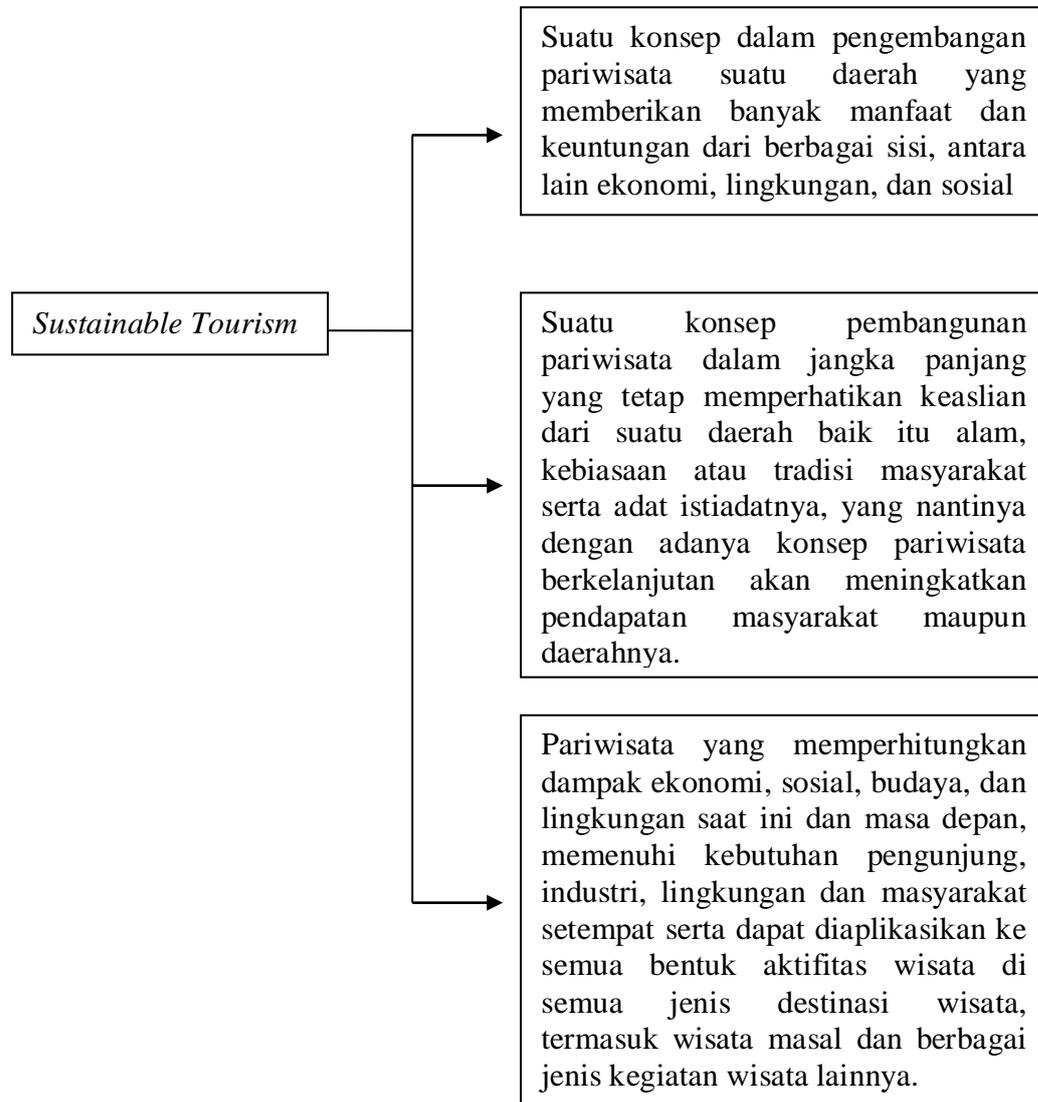
Sunaryo menyatakan pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju ke suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau diinginkan<sup>49</sup>.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Sustainable Tourism* seperti dalam gambar berikut:

---

<sup>49</sup> Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, h. 138.

GAMBAR 2.2

Definisi *Sustainable Tourism*

### 3. Pariwisata Halal

Pariwisata halal telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan OKI. Pariwisata halal merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah<sup>50</sup>.

Negara-negara Muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Qur'an katakan. Berikut bentuk pariwisata berdasarkan Al-Qur'an.

- a. Hija merupakan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk mengambil haji.
- b. Zejara mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya.
- c. Rihla adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.
- d. Penekanannya adalah pada gerakan terarah, sebagai komponen dari perjalanan spiritual dalam pelayanan Tuhan, shari'ah hukum menentukan apa yang dapat diterima - halal, dan apa yang tidak diterima – haram dalam kehidupan sehari-hari dan selama perjalanan<sup>51</sup>.

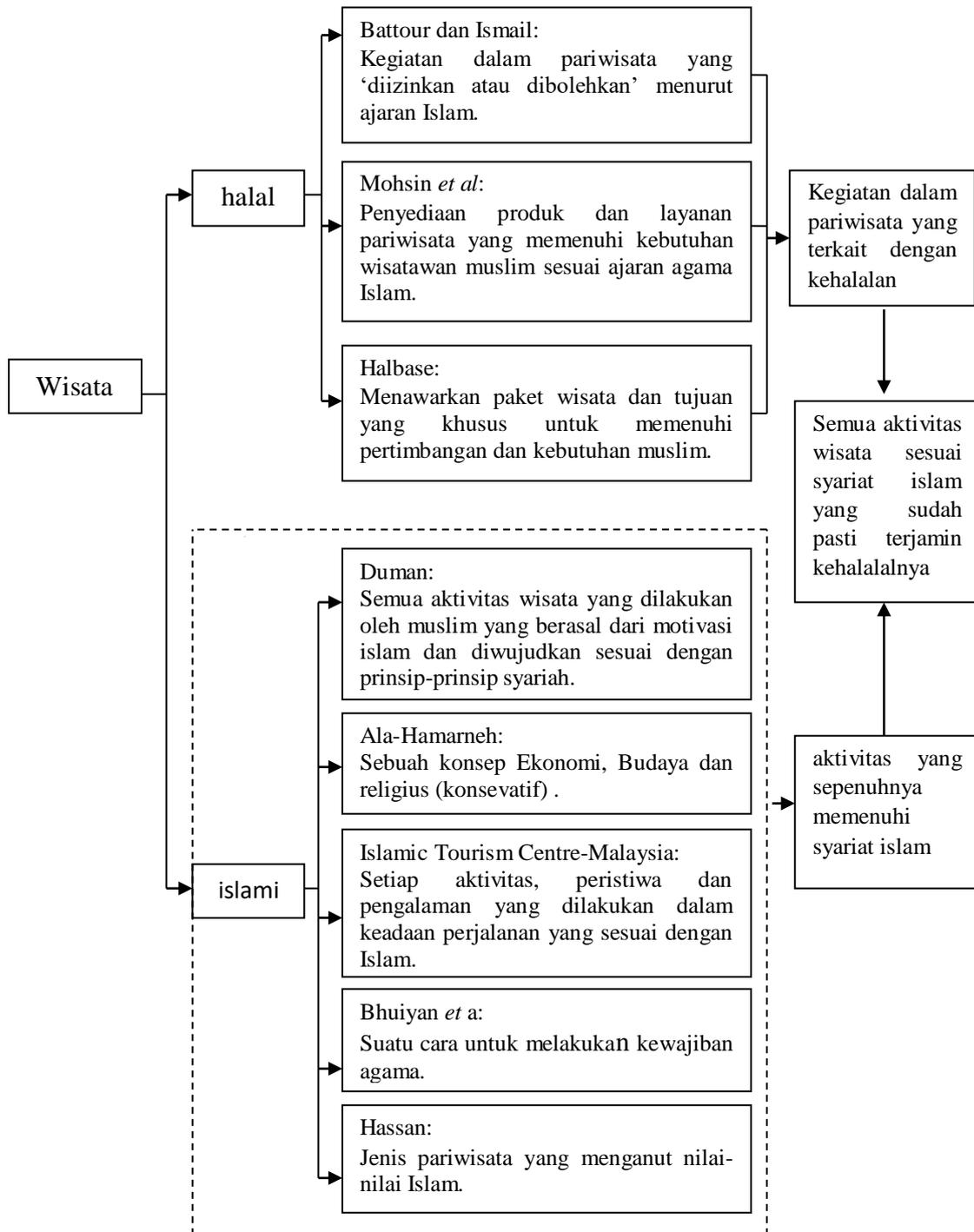
---

<sup>50</sup> Munirah, L., & Ismail, H, N, 2012, Muslim Tourists' Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges, *Proceedings Of The Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment.

<sup>51</sup> Kovjanic, G, 2014, Islamic Tourism as a Factor of the Middle East, *Turizam*, 18 (1), h. 33-43.

GAMBAR 2.3

Definisi Wisata Halal Dalam Terminologi Ahli



Dari literatur-literatur yang membahas pariwisata halal, ditemukan berbagai terminologi yang digunakan seperti wisata halal (*halal tourism*), wisata islami (*islamic tourism*), atau sharia travel (*sharia travel*)<sup>52</sup>.

Dari terminologi yang beragam tersebut, wisata halal (*halal tourism*) dan wisata islami (*islamic tourism*) merupakan terminologi yang sering digunakan diberbagai literatur. Definisi wisata islami (*islamic tourism*) dapat dilihat pada gambar 3 Berdasarkan hal tersebut, wisata islami berfokus pada banyak isu yang berbeda, seperti: partisipasi dan keterlibatan (oleh muslim), tempat-tempat wisata dan tujuan, produk (penginapan, makanan, hiburan, minuman, dan lainnya), dimensi (sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lainnya), pengelolaan layanan (pemasaran, pertimbangan budaya, agama, dan lainnya)<sup>53</sup>.

Kata halal berasal dari bahas Arab *halla, yahillu, hillan, wahalalan* yang memiliki makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Memiliki arti sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah<sup>54</sup>. Kata tersebut merupakan sumber utama yang tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan, tetapi juga memasuki semua aspek kehidupan, seperti perbankan dan keuangan, kosmetik, pekerjaan, pariwisata, dan lainnya. Sementara itu, pariwisata halal adalah salah satu konsep yang muncul terkait dengan halal dan telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh banyak ahli.

---

<sup>52</sup> Henderson, 2010; Ala-Hamaneh, 2011; Razalli *et al.* 2012; Halbase, 2015; El-Gohahary, 2016.

<sup>53</sup> Duman, T, 2011, Value of Islamic Tourism Offering: Perspectives from the Turkish Experience, World Islamic Tourism Forum (WITF, 2011), Kuala Lumpur, Malaysia, diakses Oktober 2018 pada ; Tajzadeh, NAA. 2013. Value Creation in Tourism: An Islamic approach, *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, 4(5):1252–1264.

<sup>54</sup> Al-Qhardhawi, Y, 1994, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Maktabah al-Islami: Bayrut.

Sebagian yang mendefinisikan wisata halal (*halal tourism*) dapat dilihat pada gambar 2.3. Berdasarkan definisi tersebut, dasar-dasar pariwisata halal termasuk komponen-komponen seperti: makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, keuangan Islami, paket perjalanan Islami, dan spa halal.

Dilihat dari kedua definisi yang dijelaskan oleh beberapa literatur diatas, bahwa definisi wisata halal (*halal tourism*) dan wisata islami (*islamic tourism*) menunjukkan definisi yang hampir sama yakni sesuai dengan ajaran Islam. Namun, penggunaan terminologi wisata halal dan wisata Islami menjadi perdebatan hingga kini.

Menurut El-Gohury, Battour dan Ismail<sup>55</sup> bahwa penggunaan terminologi wisata halal dan wisata islami berbeda. Wisata Islami seperti menjelaskan aktivitas atau produk tertentu yang “Islami” yakni memberikan indikasi bahwa aktivitas atau produk tersebut sepenuhnya memenuhi syariat islam (yang mungkin tidak berlaku pada setiap produk dan atau kegiatan pariwisata halal). Selain itu, istilah islami hanya diterapkan pada hal yang berhubungan langsung dengan iman dan ajaran Islam (seperti hukum Islam/Syariah, nilai-nilai Islam, prinsip dan keyakinan, serta ibadah Islam)<sup>56</sup>.

Penggunaan kata wisata Islami juga memberikan kesan bahwa suatu kegiatan atau produk hanya digunakan untuk muslim, padahal non-muslim juga

---

<sup>55</sup> El-Gohary, H. 2016. Halal Tourism, is it Really Halal?. *Tourism Management Perspective*. 19: 124-130; Battour, M, dan Ismail, MN. 2016. Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Management Perspective*. 19: 150-154.

<sup>56</sup> (Doughlass dan Shaikh, 2004).

dapat mengkonsumsi produk atau kegiatan wisata halal<sup>57</sup>. Namun menurut Khan dan Callanon<sup>58</sup>, bahwa penggunaan terminologi tersebut relatif dan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, seperti Malaysia menggunakan *Islamic Tourism Centre* yang merupakan badan penasehat untuk Kementerian Pariwisata. Di Turki, menggunakan terminologi *Halal Holiday* sebagai upaya mempromosikan wisata halalnya. Sedangkan Indonesia menggunakan wisata syariah (*sharia tourism*) untuk mempromosikan wisatanya.

## **B. Konsep Pengembangan *Community Based Tourism***

Suansri mengungkapkan beberapa point-point aspek utama pengembangan *Community Based Tourism* terdapat dimensi, yaitu<sup>59</sup>:

1. Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
2. Dimensi sosial, dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki –laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.
3. Dimensi budaya, dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam udaya lokal.

---

<sup>57</sup> El-Gohary, H, 2016, Halal Tourism, is it Really Halal?, *Tourism Management Perspective*, 19: h. 124-130.

<sup>58</sup> Khan, F, dan Callanan, M, 2017, The “Halalification” of Tourism, *Journal of Islamic Marketing*, 8(4): 558- 577.

<sup>59</sup> Suansri, Potjana, 2003, *Community Based Tourism Handbook*, REST Project, Thailand, h. 21-22.

4. Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan keperdulian akan perlunya konservasi.
5. Dimensi politik, dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.

*Community Based Tourism* (CBT) di tunjukan sebagai alat pengembangan komunitas serta konservasi lingkungan, oleh karena itu tujuan tersebut harus dilihat secara menyeluruh mengenai aspek yang memberikan dampak pada komunitas seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan politik<sup>60</sup>.

Menurut Sunaryo dalam Dhimas<sup>61</sup> memahami pengembangan *Community-Based Tourism* (CBT) membutuhkan partisipasi masyarakat yang baik, dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat harusnya diajari untuk mengelola destinasi pariwisata sehingga tercapai pariwisata yang berkelanjutan. Dari penjelasan diatas, alat pengukuran *Community Based Tourism* (CBT) terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.

Ciri-ciri khusus dari *Community Based Tourism* (CBT) menurut Murphy<sup>62</sup> yakni menekankan strategi yang pada identifikasi tujuan masyarakat serta keinginan dan kemampuan mereka dalam menerima manfaat pariwisata

---

<sup>60</sup> Setyo, Dhimas Nugroho, 2018, *Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata*, Jurnal Pariwisata, Vol.5 No 1.

<sup>61</sup> Setyo, Dhimas Nugroho, 2018, *Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata*, Jurnal Pariwisata, Vol.5 No 1.

<sup>62</sup> Murphy, P.E, 1985, *Tourism A Community Approach*, Metheun: London, h. 153.

sehingga setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat.

Timothy<sup>63</sup> mengungkapkan ciri-ciri khusus *Community Based Tourism* (CBT) berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain memiliki ketertarikan atau minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan.

### C. Konsep Pengembangan Melalui *Sustainable Tourism*

Aronsson menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang interpretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yaitu<sup>64</sup>:

1. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mampu mengatasi permasalahan sampah lingkungan serta memiliki perspektif ekologis
2. Pembangunan pariwisata berkelanjutan menunjukkan keberpihakannya pada pembangunan berskala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal atau setempat
3. Pembangunan pariwisata berkelanjutan menempatkan daerah tujuan wisata sebagai penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus dengan mengeksploitasi daerah setempat

---

<sup>63</sup> Timothy, 1999, h. 373.

<sup>64</sup> Aronsson, 2000, h. 40.

4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada berkelanjutannya budaya, dalam hal ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan meninggalkan budaya di daerah tujuan wisata.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Yaman dan Mohd<sup>65</sup> ditandai dengan empat kondisi yaitu : (1) Anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata; (2) Pendidikan bagi tuan rumah, perilaku industri dan pengunjung atau wisatawan; (3) Kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung; (4) Investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternatif Indikator yang dikembangkan oleh pemerintah RI tentang pembangunan.

Pariwisata berkelanjutan terdapat beberapa alat ukur yakni menggunakan alat ukur dengan konsep *Community-Based Tourism* (CBT) dan konsep *cittaslow philosophy*. Namun, pada konsep *cittaslow philosophy* dalam penerapannya lebih mengutamakan pada tempat baik dari segi wilayah maupun masyarakat lokal dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

*Cittaslow Philosophy* diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari isu globalisasi pada suatu wilayah dengan meningkatkan *sense of place* melalui kekhasan wilayah dan identitas lokal. *Cittaslow Philosophy* menitik beratkan kekayaan lokal, konsep ini juga mendorong adanya keberlanjutan ekonomi bagi usaha lokal.

---

<sup>65</sup> Yaman dan Mohd, 2004, h. 584.

*Cittaslow Philosophy* dapat menjadi alternatif dalam pembangunan kota yang berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat lokal, perlindungan lingkungan dan pelestarian kebudayaan mengungkap destinasi dapat berkembang secara berkelanjutan jika dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>66</sup>: (1) Melindungi dan meningkatkan daya tarik alam dan buatan yang menjadi basis industri pariwisata; (2) Menggunakan setiap sumberdaya yang tersedia sesuai dengan nilai dan aspirasi masyarakat lokal masa kini dan yang akan datang, serta menghasilkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan mereka; (3) Mengembangkan dan memasarkan produk dengan tepat dengan memperhatikan perbedaan dan daya saingnya, sehingga tetap mampu secara fleksibel merespon perubahan pasar; (4) Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap kemajuan ekonomi di destinasi dan melakukan promosi berkelanjutan; (5) Meningkatkan daya tarik destinasi, menjamin kesesuaian promosi dengan fakta destinasi, mendorong pertambahan kunjungan-ulang dan meningkatkan reputasi destinasi.

Pariwisata berkelanjutan hendaknya memperhatikan :

1. Memastikan aspek ekonomi jangka panjang dengan cara menyediakan manfaat ekonomi bagi semua *stakeholders* yang didistribusikan secara merata.
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya lingkungan, dengan cara mempertahankan proses ekologi esensial dan membantu konservasi warisan alam dan *biodiversity*.

---

<sup>66</sup> Mayer, H., & Knox, P. L., 2009, Wray (dalam Damanik dan Teguh, 2012)

3. Menghormati sosial dan budaya masyarakat lokal, dengan cara melindungi warisan bangunan, warisan budaya hidup, dan nilai tradisional serta berkontribusi pada pemahaman antar budaya dan toleransi.

Dari penjelasan di atas pariwisata berkelanjutan adalah suatu pariwisata dimana dapat meminimalisir dampak negatif dan berdampak pada pariwisata yang akan datang dengan memenuhi beberapa aspek yakni ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

### **1. Prinsip-prinsip dalam *Sustainable Tourism***

Menurut Sunarta dan Arida prinsip-prinsip dalam *sustainable tourism* (pariwisata berkelanjutan) terdiri dari 9 prinsip yaitu<sup>67</sup>: (1) partisipasi; (2) Keikutsertaan para pelaku/Stakeholder Involvement; (3) Kepemilikan Lokal; (4) Pembangunan Sumber Daya yang Berkelanjutan; (5) Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat; (6) Daya Dukung; (7) Monitor dan Evaluasi; (8) Akuntabilitas; (9) Pelatihan. Penjelasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>67</sup> Sunarta, Nyoman dan Nyoman Sukma Arida, 2017, *Pariwisata Berkelanjutan*, Bali: Cakra Press, h. 12.

TABEL 2.1  
Prinsip-prinsip *sustainable tourism*

No	Prinsip-prinsip	Penjelasan deskriptif
1	Partisipasi	<p>Mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan yang baik perlu adanya peran dari masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap pembangunan pariwisata dengan ikut serta dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan pada daya tarik wisata.</p> <p>Masyarakat lokal juga besar perannya dalam pelaksanaan atau pengimplementasian strategi-strategi yang telah disusun.</p>
2	Keikutsertaan para pelaku/Stakeholder Involvement	<p>Meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, juga pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan, serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan peranan dari pihak terkait atau <i>stakeholder</i> penting perannya, karena berhasil tidaknya suatu pembangunan terutama pada pariwisata berkelanjutan dilihat dari kontribusi <i>stakeholder</i> terhadap pembangunan.</p>
3	Kepemilikan Lokal	<p>Menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat lokal. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran dan sebagainya seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat.</p> <p>Mewujudkan kepemilikan lokal tentunya sangat membutuhkan pelatihan dan pendidikan bagi penduduk lokal serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis atau wirausahawan lokal.</p>

4	Pembangunan Sumber Daya yang Berkelanjutan	<p>Kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (<i>irreversible</i>) secara berlebihan.</p> <p>Didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan.</p> <p>Menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteriakriteria dan standar-standar internasional.</p> <p>Mendukung tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam pelaksanaannya harus memanfaatkan sumber daya yang dapat dilakukan pembaharuan sampai dimasa yang akan. Penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui bertujuan untuk generasi selanjutnya bisa merasakan dan memanfaatkan sumber daya yang telah ada lama.</p>
5	Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat	<p>Terciptanya kondisi yang harmonis antara pengunjung atau wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud.</p> <p>Masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menjaga serta merawat pariwisata yang ada di daerahnya.</p>
6	Daya Dukung	<p>Meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara regular sehingga dapat ditentukan penyesuaiannya atau perbaikan yang dibutuhkan.</p>
7	Monitor dan Evaluasi	<p>Mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak dari pariwisata.</p> <p>Adanya monitor dan evaluasi (monev) maka program atau kegiatan yang sedang dikerjakan akan selalu diawasi keberlangsungannya dan</p>

		apabila ada kesalahan ataupun kekurangan akan langsung dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program atau kegiatan tersebut.
8	Akuntabilitas	Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.
9	Pelatihan	Mebutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis atau berwirausaha, <i>vocational</i> , dan professional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan. Mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah tentu daya manusia yang berkualitas maka perlu adanya proses peningkatan kemampuan serta pemahaman pada masyarakat perihal pengelolaan pariwisata.

Sumber: Sunarta dan Arida, 2017

## 2. Peran Stakeholders

Ada beberapa peran stakeholders di dalam pengembangan pariwisata:

### a. Peran Pemerintah

Dalam pengembangan pariwisata tentu adanya peranan dari pemerintah daerah sebagai pengatur serta pengawasan. Destinasi pariwisata di Kota Pagar Alam memiliki potensi daya tarik wisata yang sangat tinggi sampai di kancah internasional. Pemerintah memiliki peranan sebagai penyedia infrastruktur, pengelolaan, dan perencanaan dari pemerintah daerah. Ndraha dalam Martins, Paturusi, dan Surya menjelaskan bahwa sesungguhnya peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal-hal yang bersifat ideologi dan spiritual<sup>68</sup>.

Untuk tercapainya pariwisata berkelanjutan yang baik maka perlu adanya peranan dari pemerintah. Menurut Martins, Paturusi, dan Surya peran pemerintah adalah sebagai berikut<sup>69</sup>: (1) Peran pemerintah dalam membuat regulasi; (2) Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana; (3) Peran pemerintah dalam membuat perencanaan; (4) Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan. Penjelasan dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>68</sup> Martins, Zerferino, Syamsul Alam Paturusi dan Ida Bagus Ketut Surya. 2017. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Area Branca Metiaut, Dili. *JUMPA.Vol.3.No.2*.

<sup>69</sup> Martins, Paturusi, dan Surya, 2017.

TABEL 2.2

## Peran pemerintah

No	Peran pemerintah	Penjelasan deskriptif
1	Membuat regulasi	Undang-Undang kepariwisataan, peraturan yang berhubungan dengan perlindungan wisatawan dan peraturan-peraturan lainnya. Adanya regulasi, semua kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan akan berjalan dengan tertib dan lancar sesuai yang diharapkan.
2	Menyediakan sarana dan prasarana	Menyediakan meja, kursi, rumah peristirahatan, menyediakan toilet, menyediakan penerangan dan lain-lainnya. Sarana adalah perlengkapan pembelanjaan yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Sarana tersebut antara lain seperti gedung, ruang, kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan menarik perhatian dan minat wisatawan untuk berkunjung.
3	Membuat perencanaan	Mengembangkan lingkungan politik, fisik, sosial, dan ekonomi sebagai suatu komponen yang saling terkait dan tergantung dengan yang lainnya. Melakukan suatu pengembangan harus memperhatikan komponen-komponen seperti lingkungan politik, fisik, sosial, dan budaya, karena dalam proses pengembangan atau pembangunan empat komponen tersebut sangat terikat satu sama lainnya dalam proses pengembangan atau pembangunan. Untuk tercapainya pariwisata berkelanjutan maka perlu adanya peranan dari pemerintah dalam membuat perencanaan yang baik, hal tersebut sangat penting agar suatu kebijakan

		dapat berjalan dengan baik.
4	Melakukan pengawasan	Melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau unit kerja. Peranan dari proses pengawasan sangatlah penting karena untuk terealisasinya suatu kebijakan, maka harus selalu dilakukan pengawasan (berkelanjutan) untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi.

Sumber: Martins, Paturusi, dan Surya, 2017

#### **b. Peran Masyarakat**

Peran serta masyarakat tentunya akan timbul karena adanya manfaat langsung yang didapatkan dari lingkungan sekitar pariwisata. Agar dapat memberikan manfaat, maka lingkungan tersebut harus terus dijaga. Dalam kegiatan pariwisata, jika kelestarian lingkungan sekitar daerah pariwisata dijaga dengan baik, maka masyarakat yang akan mendapatkan keuntungannya secara ekonomi<sup>70</sup>. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari proses pembangunan pariwisata. Kelestarian lingkungan objek wisata yang terjaga, tentunya akan meningkatkan nilai jual pariwisata tersebut baik di kancah domestik maupun mancanegara.

Listyaningsih menyatakan apapun yang menjadi tujuan pembangunan, sesungguhnya pembangunan masyarakatlah yang harus diperhatikan. Posisi masyarakat bukan menjadi obyek pembangunan tetapi harus dilibatkan secara

---

<sup>70</sup> Mahdayani, W, 2009, *Ekowisata Panduan Dasar Pelaksanaan*, Nias Selatan: UNESCO dan Dinbudpar Nias Selatan, h. 20.

aktif dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat juga menjadi subjek pembangunan. Jadi dalam proses pembangunan, masyarakat juga memiliki peranan dalam penentuan arah pembangunan dan menjadi pelaku pengawasan terhadap suatu pembangunan<sup>71</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta agar masyarakat mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan pariwisata memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat (lokal), sehingga penting peranan dari masyarakat dalam mengawasi dan ikut serta dalam pembangunan pariwisata untuk memastikan kebijakan tersebut terealisasi.

Santosa dalam Nofriya menyatakan bahwa pembangunan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat sering menyebabkan rasa terpinggirnya di antara masyarakat setempat sehingga dapat menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan kalangan investor pariwisata dan pemerintah. Apabila terjadinya konflik antara masyarakat dengan kalangan *stakeholder* maka nantinya akan mengancam keberlangsungan pembangunan pariwisata itu sendiri. Hubungan masyarakat dengan *stakeholder* dalam pembangunan pariwisata sangat erat

---

<sup>71</sup> Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan "Pendekatan Konsep dan Implementasi"*. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 127.

kaitannya, karena masyarakat ikut serta secara aktif dalam pengelolaan ataupun pengembangan pariwisata<sup>72</sup>.

Woodley dalam Nofriya menyatakan “*Local people participation is a prerequisite for sustainable tourism*”. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan, agar masyarakat mau ikut berperan serta dalam kegiatan pariwisata yang tidak merusak lingkungan terdapat tiga komponen, yaitu<sup>73</sup>:

- 1) *Enabling setting*, yaitu memperkuat situasi di daerah pariwisata termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat berkefektifitas.
- 2) *Empowering local community*, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal melalui pendidikan, pelatihan dan berbagai bentuk pengembangan lainnya.
- 3) *Socio-political support*, yaitu diperlukan adanya dukungan sosial, dukungan politik, *networking* oleh pemerintah setempat, dinas pariwisata dan elemen lain yang mendukung.

Chamdani menyampaikan bahwa peran serta masyarakat dalam kegiatan pariwisata dapat berbentuk usaha dagang atau usaha pelayanan jasa baik di dalam maupun di luar kawasan objek wisata. Usaha kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut, akan menciptakan suasana merasa saling memiliki

---

<sup>72</sup> Santosa dalam Nofriya, 2016, *Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Pariwisata Hijau di Sumatera Barat*. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Lingkungan II. Padang.

<sup>73</sup> Woodley, A. 1993, *Tourism and Sustainable Development: The Community Perspective*. In J. G. Nelson, R. Butler, & G. Wall. *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing* (pp. 135}146). Waterloo: Heritage Resource Centre, University of Waterloo. dalam Nofriya. 2016. *Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Pariwisata Hijau di Sumatera Barat*. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Lingkungan II. Padang.

terhadap tempat mata pencaharian yang pada akhirnya nanti masyarakat ikut serta berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan<sup>74</sup>.

### c. Peran Swasta

Pihak swasta sebagai pelaku bisnis mempunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung pariwisata. Yoeti dalam Amalsyah, Hamid, dan Hakim menyatakan bahwa kepariwisataan membutuhkan banyak sarana pendukung seperti restoran, akomodasi, biro perjalanan, transportasi dan lain-lain. Dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan wisatawan ketika berkunjung<sup>75</sup>.

Dalam usaha untuk mencapai adanya pariwisata berkelanjutan maka tentunya penting adanya peranan dari pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan wisata di Kota Pagar Alam yaitu membantu aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemanfaatan fasilitas lokal, melakukan promosi, melakukan CSR dengan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan melakukan aktivitas peduli lingkungan.

Peranan dari swasta juga diharapkan dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal, menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan

---

<sup>74</sup> Chamdani, Usman, 2018, *Dimensi-dimensi Pariwisata Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish, h. 78.

<sup>75</sup> Alamsyah, reski, Djamhur Hamid, dan Luchman Hakim, 2016, Peran *Stakeholder* pariwisata dalam pengembangan pulau samalena sebagai destinasi wisata bahari, jurnal *administrasi bisnis*, vol, 37, No, 1.

kreatifitas masyarakat dan melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal berupa pemanfaatan fasilitas lokal dalam hal pembuatan paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan, yaitu:

**a. Aspek Lingkungan**

Pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan berarti mendayagunakan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata, dan upaya untuk melestarikan serta untuk mengembangkan lingkungan itu sendiri<sup>76</sup>.

Lingkungan dalam sektor pariwisata merupakan faktor utama yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi objek wisata yang ditawarkan. Dengan menawarkan kondisi lingkungan yang terjaga keaslian dari alamnya, maka akan meningkatkan kualitas dari suatu objek pariwisata. Karena antara lingkungan dan pariwisata memiliki hubungan yang erat dan saling terikat, sehingga untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan maka harus didukung dengan lingkungannya.

Dari aspek lingkungan menjelaskan bagaimana dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses ekologi dan turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata.

---

<sup>76</sup> Chamdani, Usman, 2018, *Dimensi-dimensi Pariwisata Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish, h. 72.

Dari uraian tersebut, maka untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan perlu adanya pemanfaatan serta penjagaan terhadap lingkungan yang menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata. Penjagaan baik dari segi kebersihan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat lokalnya.

#### **b. Aspek Ekonomi**

Memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada semua *stakeholder* dengan adil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan (membuka usaha), dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta mengurangi kemiskinan. Memperhatikan aspek ekonomi, pembangunan pariwisata secara berkelanjutan memberikan dampak positif pada setiap *stakeholder* seperti adanya lapangan pekerjaan yang bisa menjadi solusi pemberantasan kemiskinan.

#### **c. Aspek Sosial-Budaya**

Aspek sosial-budaya memiliki peranan untuk menjaga atau menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai-nilai warisan budaya, adat yang mereka bangun, dan berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar-budaya. Menurut Soedjatmiko dalam

Listyaningsih<sup>77</sup> hal tersebut bisa terjadi apabila manusia dan struktur sosialnya mempunyai mental dewasa, sehingga berpartisipasi secara kreatif, ada “*innerwill*”, dan proses emansipasi diri.

Pembangunan pariwisata secara berkelanjutan harus memperhatikan dari aspek sosial-budaya. Adanya aspek sosial-budaya memiliki peranan untuk melestarikan sosial dan budaya disekitar objek wisata. Untuk tercapainya *sustainable tourism* tentunya harus mempertimbangkan dari kebudayaan masyarakat, nilai-nilai warisan dan adat yang sudah ada secara turun menurun. Aspek sosial-budaya yang dipertahankan dalam suatu pembangunan, maka hal tersebut akan menjadi suatu nilai lebih dari pembangunan tersebut.

Konsep pariwisata berkelanjutan merupakan turunan dari pembangunan berkelanjutan. Dimana, pembangunan berkelanjutan merupakan perubahan positif sosial, dan ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, *viabilitas* politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya<sup>78</sup> selain itu, Sakti (2012) menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelastarian, memberikan peluang bagi generasi muda untuk

---

<sup>77</sup> Listyaningsih. 2014, *Administrasi Pembangunan “Pendekatan Konsep dan Implementasi”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 38.

<sup>78</sup> Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

memanfaatkan dan mengembangkannya berdasarkan tatanan sosial yang telah ada.

Pariwisata berkelanjutan (Anonim, 2000) adalah pertama, kesadaran tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, bahwa strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menempatkan pariwisata sebagai *green industry* (industri yang ramah lingkungan). Kedua, peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata. Ketiga, kemampuan pemberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan produk pariwisata yang bisa bersaing secara internasional, dan mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata. Keempat, kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan menghapus atau meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Hal ini didukung dengan memberikan perhatian atau pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat lokal.

## **D. Pengembangan Pariwisata Halal**

### **1. Teori Isthslah**

Teori Isthslah merupakan kemashalatan umum sebagai salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk Usaha memperbaiki (*Islah*) terhadap kehidupan

manusia sekarang dan masa-masa yang akan datang. Dalam surah al-A'raf ayat 56 ditegaskan:

“Berlebih-lebihan menguras sumber daya alam merupakan penyebab utama terjadinya bencana” sebagaimana dipertimbangkan Allah SWT dalam Surah Asy-Su'ara ayat 151-152.

Dalam khazana pemeliharaan lingkungan, Islam mengenal kawasan *harim* yaitu suatu wilayah diperuntukkan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman. Harim adalah kawasan yang sengaja tidak boleh diganggu dan dapat menjadi bagian dari sekedar tempat 'wisata pandang'. Dengan demikian kemaslahatan umum merupakan suatu ketentuan syariat bahwa sebagai *khalifah* di bumi, Rasulullah SAW telah mencontohkan suri tauladan untuk memberikan perlindungan terhadap semua umat, termasuk kemaslahatan hewan. Tumbuh-tumbuhan dan lingkungan yang dapat menjadi salah satu sentral penyejuk dan *tafakkur*.

## 2. Pariwisata halal

Chookaew<sup>79</sup> menyatakan bahwa terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata halal dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.

---

<sup>79</sup> Chookew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S, 2015, Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economic, Business and Management*, III (7), h. 277-279.

- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi,
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari karakteristik pariwisata halal yang dijabarkan Chookaew<sup>80</sup> terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata halal:

- a. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- b. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan<sup>81</sup>.
- c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari

---

<sup>80</sup> Chookew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S, 2015, Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economic, Business and Management*, III (7), h. 277-279.

<sup>81</sup> Sapudin, A., Adi, F., & Sutomo, 2014, *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.

sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata<sup>82</sup>.

- d. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip halal<sup>83</sup>. Menurut Rosenberg dalam Sahida memahami pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah<sup>84</sup>.

Sofyan<sup>85</sup> Memahami bahwa definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai halal Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO). konsumen wisata halal bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan hotel, Sofyan itu menjelaskan, kriteria umum pariwisata halal ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat, Keempat, bebas dari maksiat. Kelima,

---

<sup>82</sup> Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A, 2012, The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry, *International Journal of Culture and Tourism Research*, 5 (1), h. 129-140.

<sup>83</sup> Sapudin, A., Adi, F., & Sutomo, 2014, *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.

<sup>84</sup> Sahida, W., Rahman, S, A., Awang, K., & Man, Y, C, 2011, The Implementation of Halal Compliance Concept Hotel: De Palma, 2<sup>nd</sup> *International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*, 17, pp, h. 138-142, Singapore: IACSIT Press.

<sup>85</sup> Sofyan, 2012, h. 33.

menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Secara garis besar, komponen definisi oprasional pariwisata meliputi hal-hal berikut ini: (a) Sistem keikutsertaan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi; (b) Mendorong berlangsungnya dinamika dan mobilitas manusia; (c) Memerlukan transportasi darat, laut, sungai maupun udara; (d) Bergantung pada minat serta apresiasi tujuan dari tiap-tiap wisatawan; (e) Menimbulkan persepsi dan apresiasi silang subkultur atau silang budaya; (f) Bertujuan untuk memperoleh nilai kepuasan tertentu yang bersifat psikologi. Jika disimpulkan esensi pariwisata terdiri atas tiga unsur utama, yaitu:

- a. Manusia sebagai pelaku.
- b. Ruang sebagai unsur fisik.
- c. Waktu.<sup>86</sup>

Konsep pariwisata dalam masyarakat mencakup empat unsur, yaitu: (a) Unsur dinamis, yaitu fenomena pariwisata yang mencakup: konsep dasar, prinsip, faktor yang mempengaruhi perjalanan; (b) Unsur pelayanan, yaitu sistem pariwisata yang mencakup komponen permintaan, persediaan dan komponen penghubung; (c) Unsur fungsional, yaitu manajemen pariwisata dan latihan; (d) Unsur akibat, yaitu dampak pariwisata terhadap ekonomi, sosial, budaya dan

---

<sup>86</sup> Engkin Mudayana, *Pariwisata Prajna Artha Buana Pariwisata Memacu Perdamaian dan Kesejahteraan Dunia*, Orasi Dies Natalis UIN.

lingkungan<sup>87</sup>.

Berdasarkan definisi oprasional dan pernyataan-pernyataan tersebut, dari sudut pandang syariat Islam, aktivitas pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip *ta'arruf* (saling mengenal), *tabadul al- manafi'* (pertukaran manfaat) dan *ta'awwun* dan *takaful* (saling menolong dan saling menanggung resiko). Oleh karena itu, salah satu misi ilmu kepariwisataan dalam Islam adalah menyusun secara ilmiah dan sistematis upaya-upaya untuk memaksimalkan manfaat pariwisata dan meminimalkan dampak negatifnya.

Konsep syariah juga dijunjung secara simbolik dengan mengenalkan identitas syariahnya yang dimaterialisasikan dengan melakukan kunjungan ziarah ke kuburan orang-orang suci (wali sanga) ataupun ke makam leluhur, melaksanakan ibadah haji, mengikuti pengajian dan termasuk juga industri pariwisata halal yang telah menjadi pemandangan umum di kalangan masyarakat Islam Indonesia saat ini.

Pesan kebangkitan agama yang terjadi sejak kejatuhan rezim Soeharto memengaruhi bidang sosial dan politik. Adapun perumusan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan dunia politik selalu menempatkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat untuk menjadi pegangan perumusan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Menurut Berger dan Luckman yang dikutip oleh Burhan Bungin menyatakan bahwa individu merupakan produk dari konstruksi sosial terhadap realitas yang terbentuk dari proses institusi, legitimasi dan

---

<sup>87</sup> Hudman dan Hawkins, Bandung ke-33 dan Wisuda ke-11, Senin, 17 April 1995 di Hotel Horison Bandung, h. 89.

sosialisasi.<sup>88</sup>

Selain adanya peran politik oleh pemerintah dalam mendukung dan merombak struktur sosial, di Indonesia sendiri peran MUI juga memiliki pengaruh besar dilihat dari segi kontribusinya mengeluarkan fatwa ataupun tausiyah yang menyangkut isu-isu sosial, politik, ekonomi dan budaya sehingga antara kebijakan politik oleh pemerintah dan orientasi MUI mempunyai peran penting dalam pemberian legitimasi untuk mewujudkan konsep wisata halal.<sup>89</sup>

Arti harfiah dari “Halal” adalah sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana yang dijelaskan dan dianut oleh umat Islam yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.<sup>90</sup> Menurut Riaz dan Chaudri yang dikutip oleh Fischer menyebutkan bahwa bahan makanan antara halal dan haram tergantung kepada sifatnya, yaitu bagaimana ia diproses dan bagaimana ia diperoleh dan semua itu adalah bentuk dari perintah ilahi.<sup>91</sup>

Adapun konsep halal pada pariwisata halal dalam pelaksanaan wisata selalu mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim dalam prosesnya sebagai contoh nilai dasar Islam pada akomodasi, restoran, hingga aktifitas wisata yang selalu berdasarkan kepada norma-norma ke-Islaman. Pariwisata halal dalam praktiknya selalu mempertimbangkan nilai halal dan haram sebagai tolak ukur utama, dengan artian seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari

---

<sup>88</sup> Burhan Bungin, *Komunikasi Pariwisata: Pemasaran dan Brand Destinasi*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 14.

<sup>89</sup> Moh.Nur Ichwan, *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, h. 107.

<sup>90</sup> Johan Fischer, “Halal Activism : Networking between Islam, the State and Market,” *AsianJournal of Social Science*, h. 112.

<sup>91</sup> Johan Fischer, “Manufacturing Halal In Malaysia,” *Springer Link* 10 , No.1 (Januari 2019), dalam <http://link.springer.com/article/10.1007/s11562-015-0323-5> html (diakses 17 Januari, 2020), 36.

sertifikasi halal yang menjadi tuntutan bagi setiap pelaku wisata.<sup>92</sup>

Nilai-nilai agama yang diaplikasikan dalam praktik pariwisata adalah berlandaskan keyakinan bahwa agama Islam itu bersifat menyeluruh, berkaitan langsung dengan sendi-sendi kehidupan. Agama Islam mengatur setiap pokok-pokok permasalahan hidup dan termasuk juga di dalamnya pariwisata yang terkandung dalam nilai-nilai dan batasan-batasan normatif.<sup>93</sup>

Pariwisata syariah dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan Islam, selalu mempertimbangkan sisi syari'at dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Segala kejadian, masalah yang timbul, ataupun peristiwa melainkan telah terdapat hukum-hukum yang mengaturnya di dalam Islam. Syari'at Islam mencakup semua jenis perbuatan manusia dengan lingkup yang luas dan menyeluruh baik yang terjadi di masa lampau, masa sekarang ataupun masa yang akan datang sudah ada hukum yang mengaturnya. Syari'at tegak di atas dalil yang diambil dari teks Al- Quran dan Al-Hadist.<sup>94</sup>

Bryan S. Turner menyatakan Agama yang dulunya bersifat privat kini tampil bertransformasi dan ikut mengambil andil di tengah masyarakat yang dikenal dengan sebutan deprivatisasi.<sup>95</sup> Fenomena wisata halal tidak lepas kaitannya dari agama yang mulai memasuki ruang publik. Agama tidak hanya

---

<sup>92</sup> Widagdjo, "*Analisis Pasar Pariwisata Indonesia*", h. 74.

<sup>93</sup> Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, *Islam dan Kepariwisataaan: Menggali Nilai Dasar Pariwisata dalam Islam Menuju Pengembangan Pariwisata yang Ideal di Provinsi Lampung*", (Lampung: Departemen Agama, 1998), h. 36.

<sup>94</sup> Samit Atif Az-Zain, *Syari'at Islam: dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, (Bandung: Penerbit Husaini, 1981), h. 17.

<sup>95</sup> Bryan S. Turner dalam Gabrielle Marranci (ed.), "Islam, Public Religion and the Secularization Debate", vol.1. National University of Singapore, h. 11.

bersifat privat namun sudah bergerak lebih jauh dengan menampilkan nilai-nilainya ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Noorhaidi Hasan menjelaskan bahwa era sekarang banyak daerah mulai menampilkan identitas syariah dalam bidang sosio-politik dan mulai merambah ke berbagai bidang baik dalam ekspresi politik, transaksi hukum, kegiatan ekonomi, dan juga praktek-praktek sosial budaya yang kemudian menjadi model gaya hidup baru, kemudian diperkuat dengan munculnya kaum elit dari kalangan muslim kelas menengah yang berdampak terbentuknya jaringan dengan kemampuan mobilitas ke atas dan juga pasar untuk produk komersial.<sup>96</sup>

Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 telah membentuk suatu gerakan reformasi yang menginginkan demokratisasi serta tata pemerintahan yang baik. Pesan kebangkitan agama mulai muncul setelah kejatuhan rezim Soeharto. Hal ini membuka peluang dalam transformasi politik, mulai bermunculan organisasi, gerakan serta partai politik muslim.<sup>97</sup>

Islam dalam negara demokrasi Indonesia semakin memperlihatkan pengaruhnya, agama Islam mulai berkembang dan bangkit memengaruhi bidang sosial dan politik. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi banyak orang Indonesia untuk menempatkan agama dalam mewujudkan dan mencapai pembangunan. Kesadaran yang ditunjukkan oleh umat muslim Indonesia dengan mengedepankan agama di ruang publik telah memberikan ruang pada agama

---

<sup>96</sup> Noorhaidi Hasan, "The making of public Islam: piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere," *Contemporary Islam*), h. 230.

<sup>97</sup> Moh. Nur Ichwan, *Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik Ortodoksi Agama*, h. 103.

menjadi bagian dari ekspresi politik, transaksi hukum, kegiatan ekonomi serta praktek-praktek sosial dan budaya.<sup>98</sup>

Menurut Komaruddin Hidayat, ia menyebutkan demokrasi adalah suatu produk dari penalaran manusia sebagai makhluk sosial sedangkan agama datang dari Tuhan dan bukan produk buatan manusia. Demokrasi lebih menitikberatkan pada permasalahan manusia dan legitimasinya pun juga diperoleh dari manusia, berbeda halnya dengan agama, perilaku agama selalu mencari dalil-dalil dan rujukan yang berasal dari sabda Tuhan. Berdasarkan hal tersebut, baik agama maupun demokrasi pelaku dari keduanya tetaplah manusia, maka persoalan demokrasi dan persoalan agama adalah juga persoalan manusia.<sup>99</sup>

Sebuah negara tentu mempunyai tata perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Suatu negara mempunyai pengaturan-pengaturan hubungan manusia dalam masyarakat dan menetapkan tujuan-tujuan dalam kehidupan bersama.<sup>100</sup> Sebuah negara juga memiliki pemimpin dan yang dipimpin yaitu antara peran penguasa dan yang dikuasai. Kekuasaan adalah cara yang dilakukan untuk hal yang diinginkan dan mempunyai tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku politik yang mempunyai kekuasaan.<sup>101</sup>

Adakalanya legitimasi politik yang dikeluarkan oleh pemimpin terhadap yang dipimpin tentu juga memperhatikan aspek nilai-nilai keagamaan. Agama

---

<sup>98</sup> Noorhaidi Hasan, "The making of public Islam: piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere", h. 230.

<sup>99</sup> Komaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama Dan Demokrasi, Dalam Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 189.

<sup>100</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2002), h. 38.

<sup>101</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2002), h. 49.

dianggap mampu memberikan konsep-konsep pemecahan yang terjadi di dunia modern yaitu dengan mengangkat nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.<sup>102</sup> Legitimasi menyangkut keyakinan moral yang membenarkan hak untuk memanfaatkan sumber-sumber daya ini. Legitimasi merujuk pada penerimaan golongan bukan pemimpin atas justifikasi-justifikasi sebagai hal yang bermakna dan masuk akal. Legitimasi diperoleh bukan dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas. Legitimasi berkaitan erat dengan apakah rakyat menerima atau tidak hak moral dari pemimpin-pemimpin politik untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat atas mereka; dengan kata lain hanya rakyat yang dapat memberikan legitimasi.<sup>103</sup>

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu lembaga non pemerintah di Indonesia, berdiri pada masa Soeharto 1975. Lembaga ini pada awalnya mengabdikan diri melayani pemerintah terutama dalam mendukung pemerintah untuk memproduksi tausyiah dan melegitimasi kebijakan pemerintahan. Pada Musyawarah Nasional (MUNA) tahun 2000, yaitu masa pemerintahan Abdurahman Wahid, MUI kemudian mengubah haluan dari perannya melayani pemerintahan berbalik arah menjadi pelayan umat. Tekad untuk membela kepentingan dan aspirasi muslim yang konservatif.<sup>104</sup> MUI pasca orde baru mempunyai tiga orientasi utama yaitu meliputi orientasi normatif,

---

<sup>102</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 6.

<sup>103</sup> Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Terj (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992), h. 203.

<sup>104</sup> Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Terj (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992), h. 104.

orientasi teologi dan orientasi moral.<sup>105</sup>

Dalam mencapai pembangunan dan pengaruh modernisasi, menyebabkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, berupa pembaharuan maupun pergeseran-pergeseran baik menyangkut struktur dan organisasi masyarakat ataupun beserta lembaga-lembaganya. Perubahan juga berkenaan dengan norma, nilai dan pandangan perilaku. Pada dasarnya setiap masyarakat mengalami perubahan, apakah ia masyarakat terbelakang ataupun masyarakat modern akan senantiasa berubah seiring berjalan waktu. Dari perubahan-perubahan yang berlangsung ada yang bergerak cepat dan ada pula yang lambat tersendat-sendat.

Perubahan-perubahan yang ada disebut dengan transformasi sosial yang menyangkut segala sistem pembuat aturan masyarakatnya. Transformasi sosial dapat terjadi pada tiga bidang diantaranya: *pertama*, Gejala pada bidang ekonomi yaitu adanya perubahan yang erat kaitannya dengan proses industrialisasi dan penggunaan teknologi maju. *Kedua*, perubahan di bidang politik dengan kaitan pada perubahan di lembaga-lembaga politik sebagai contoh pada kepartaian, deferensiasi struktur politik dan sebagainya. *Ketiga*, perubahan yang terjadi pada bidang sosial dan psikologis yang berhubungan dengan

---

<sup>105</sup> Sejumlah orientasinya diantaranya: *Pertama*, orientasi normatif meliputi isu-isu halal dan haram yang melampaui mazhab-mazhab hukum Islam tradisional seperti sertifikasi pangan halal dan layanan perbankan syariah, tidak hanya sebatas itu saja tetapi juga mencakup pada bidang lain yaitu dalam pemurnian moralitas publik dengan menolak pornografi dan pornoaksi, pendidikan berupa polemik RUU sistem pendidikan nasional, citra islam, pemikiran islam (pluralisme, liberalisme, sekulerisme dan keyakinan islam. *Kedua*, orientasi yang mencakup teologi di mana pada awalnya MUI menganut teologi dasar konservatif kini menjadi lebih puritan yang bisa dilihat pada Musyawarah Nasional pada tahun 2000 ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang liberalisme, sekulerisme, dan pluralisme agama, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. *Ketiga*, orientasi moralnya yang puritan dan intervensi pada urusan publik selain dari fatwa dan tausiyah juga meliputi proses hukum, dan politik di parlemen serta demonstrasi massa. Isu-isu yang menjadi wilayah otoritas MUI semakin luas mencakup isu sosial, politik, ekonomi dan budaya. *Ibid.*, h. 107.

tingkah laku, norma- norma masyarakat, sistem nilai dan kepercayaan yang dianut.